



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

Jalan Adi Sucipto NO. 50 (0561) 762622 No Wa : 08115656122
Email : disperkim@kalbarprov.go.id website : perkim.kalbarprov.go.id

PONTIANAK

Kode Pos 78124

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NOMOR : 07.1 / DPRKP / 2021

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021**

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 800.05/SK/17/SET/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Pengganti Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembarab Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat : 11-294/2019);
8. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat ;
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
10. Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Nomor 800.05/SK/17/SET/I/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA : Untuk penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana bersifat rahasia sesuai Undang-undang, asas kepatutan, dan asas kepentingan umum, maka uji konsekuensi informasi yang dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dilakukan saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner.
- .KEEMPAT : Klasifikasi Daftar Informasi Publik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat telah tersedia dan diumumkan pada website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 7 Januari 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,



HENDRI BACHTIAR

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Kalimantan Barat di – Pontianak;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat di – Pontianak;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat di – Pontianak;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 07.1 / DPRKP / 2021

TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021

A. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No	Nama Informasi	Pejabat yang Menguasai/ Penanggung Jawab	Format yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
1	Profil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalimantan Barat	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Hardcopy Softcopy	-
2	Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Hardcopy Softcopy	-
3	Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Hardcopy Softcopy	-
4	Profil Singkat Pejabat Struktural Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Hardcopy Softcopy	-
5	SOP Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
6	Daftar Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
7	Daftar Regulasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
8	Profil PPID Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Hardcopy Softcopy	-
9	Visi dan Misi Pelayanan Publik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Hardcopy Softcopy	-
10	Laporan PPID Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
11	Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Hardcopy Softcopy	1 Tahun

No	Nama Informasi	Pejabat yang Menguasai/ Penanggung Jawab	Format yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
12	Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Renja Monev dan Keuangan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
13	RKA Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Renja Monev dan Keuangan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
14	DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Renja Monev dan Keuangan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
15	DIPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Renja Monev dan Keuangan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
16	LAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Renja Monev dan Keuangan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
17	LKPj Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Renja Monev dan Keuangan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
18	LPPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Renja Monev dan Keuangan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
19	Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Renja Monev dan Keuangan	Hardcopy Softcopy	5 Tahun
20	Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Renja Monev dan Keuangan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
21	Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Renja Monev dan Keuangan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
22	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kasubbag Renja Monev dan Keuangan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
23	Laporan Tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Renja Monev dan Keuangan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
24	Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Renja Monev dan Keuangan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
25	Data Statistik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Renja Monev dan Keuangan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
26	Data Perumahan dilokasi rawan bencana	Kasi Pendataan dan Perencanaan Perumahan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun

No	Nama Informasi	Pejabat yang Menguasai/ Penanggung Jawab	Format yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
27	Daftar Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Kasi Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
28	Daftar Pembangunan rumah khusus akibat relokasi bencana/program Pemerintah Provinsi	Kasi PSU Perumahan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
29	Daftar Rumah Warga Terkena Bencana yang ditetapkan kepala daerah Provinsi atau Kab/Kota	Kasi Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
30	SOP Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Kasi Pendataan dan Perencanaan Perumahan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
31	SOP Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Kasi Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
32	SOP Bantuan Pembangunan PSU Perumahan Khusus atau Pembangunan rumah khusus akibat relokasi bencana /program pemerintah provinsi	Kasi PSU Perumahan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
33	Sistem Informasi Kawasan Permukiman Berbasis Spasial	Kasi Pendataan Kawasan Permukiman	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
34	Site Plan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Kasi Pengembangan Kawasan Permukiman	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
35	Database Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman	Kasi PSU Kawasan Permukiman	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
36	Data Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Kasi Pendataan Kawasan Permukiman	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
37	Daftar Pembangunan PSU di Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Kasi Pengembangan Kawasan Permukiman	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
38	Data RTLH sesuai Kewenangan Provinsi	Kasi Pendataan Kawasan Permukiman	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
39	Daftar Bantuan RTLH sesuai Kewenangan Provinsi	Kasi Pengembangan Kawasan Permukiman	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
40	Data PSU Kawasan Permukiman yang di laksanakan oleh Provinsi.	Kasi Pendataan Kawasan Permukiman	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
41	Daftar PSU Kawasan Permukiman yang di laksanakan oleh Provinsi.	Kasi PSU Kawasan Permukiman	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
42	Data Capaian SPM Air Minum Dan Sanitasi	Kasi Pendataan & Perencanaan	Hardcopy Softcopy	5 Tahun

No	Nama Informasi	Pejabat yang Menguasai/ Penanggung Jawab	Format yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
		Bidang Cipta Karya		

B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

No	Nama Informasi	Pejabat yang Menguasai / Penanggung Jawab	Format yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
1	Data Persentase air minum dan sanitasi	Kasi Pendataan Dan Perencanaan Bidang Cipta Karya	Softcopy	5 Tahun
2	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang Dan Jasa	Kasi pada Dinas PRKP	-	5 Tahun

C. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

No	Nama Informasi	Pejabat yang Menguasai / Penanggung Jawab	Format yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
1	Laporan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Renja Monev dan Keuangan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
2	Produk Layanan Publik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Hardcopy Softcopy	-
3	Maklumat Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Hardcopy Softcopy	-
4	Maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Hardcopy Softcopy	-
5	Leaflet Indonesia Darurat Narkoba	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Hardcopy Softcopy	-
6	Analisis Jabatan (ANJAB) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov Kalbar			
7	Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kalbar Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Hardcopy Softcopy	-
8	Evaluasi Jabatan (EVJAB) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Hardcopy Softcopy	-

No	Nama Informasi	Pejabat yang Menguasai / Penanggung Jawab	Format yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
9	Daftar Urut Kepangkatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
10	Data Pemohon Informasi Publik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
11	Daftar Informasi Publik (DIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
12	Leaflet Permohonan Analisa Kebutuhan Biaya Pembangunan Gedung Negara	Kasi Penataan Bangunan Dan Lingkungan	Hardcopy Softcopy	-
13	Leaflet Permohonan Analisa Tingkat Kerusakan Bangunan Gedung Negara dan Rumah Tangga	Kasi Penataan Bangunan Dan Lingkungan	Hardcopy Softcopy	-

D. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Rincian Harga Penyusunan HPS	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b; b. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; d. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; e. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; f. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.		√	10 tahun

No	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
2.	Rincian Harga Penawaran Penyedia Pemenang Berkontrak	a. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 2 dan 3; b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.		√	5 tahun
3.	Rencana Anggaran Biaya (RAB)	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b; b. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; d. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; e. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; f. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.		√	10 tahun
4.	Gambar Rencana	a. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.		√	Tertutup sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari pemegang cipta.
5.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	a. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; c. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;		√	10 tahun

No	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		d. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; e. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
6.	Addendum Kontrak	a. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; d. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.		√	10 tahun

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN



HENDRA BACHTIAR